



PT. BPRS DINAR ASHRI

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA DAN *SELF* ASSESSMENT BPRS TAHUN 2023

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 394 Blok
X-XI Mataram
Telp : (0370) 626777
Website : www.bprsdinarashri.co.id
Email : info@bankdinar.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. BPRS Dinar Ashri berkomitmen dengan senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dimasa-masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan, komitmen ini di dukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPRS Dinar Ashri.

Agar dapat terus maju, BPRS Dinar Ashri juga harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Perubahan-perubahan yang dihadapi menuntut BPRS Dinar Ashri untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara professional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi BPRS Dinar Ashri untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

B. Prinsip-prinsip Tata Kelola BPRS

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPRS Dinar Ashri sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam menggunakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat

4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan penerapan Tata Kelola BPRS Dinar Ashri

Penerapan tata kelola BPRS Dinar Ashri merupakan sesuatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha BPRS Dinar Ashri untuk jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola BPRS Dinar Ashri memiliki tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
2. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders.
3. Menarik minat dan kepercayaan investor kepada BPRS Dinar Ashri
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif dalam jangka panjang.

D. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola BPRS Dinar Ashri dilakukan dengan mengacu kepada:

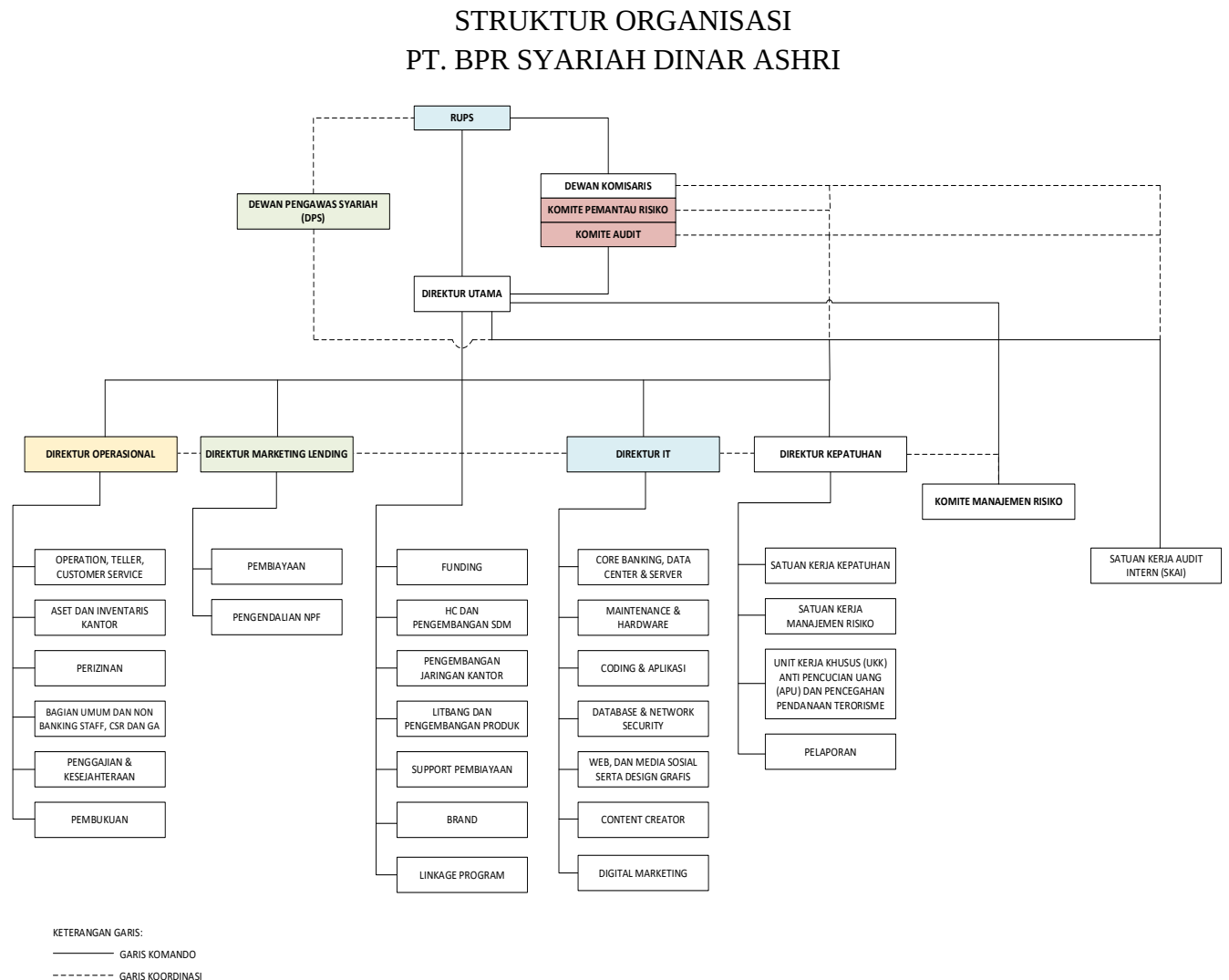
1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
3. POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4. POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
5. POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
6. SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. SEOJK No. 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
8. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

E. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata kelola BPRS

Sejalan dengan ketentuan Undang –undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, maka struktur tata kelola BPRS Dinar Ashri terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari BPRS Dinar Ashri.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPRS Dinar Ashri telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip *Check and balance* serta system pengendalian internal yang baik.

F. Struktur Tata kelola BPRS Dinar Ashri:



Struktur tata kelola BPRS Dinar Ashri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Audit
5. Direksi
6. Dewan Pengawas Syariah
7. Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi, seperti:
 - a. PE. Ka. Pembiayaan (Lending)
 - b. PE. Ka Pendanaan (Funding)
 - c. PE. Ka. Support Pembiayaan
 - d. PE. Audit Intern
 - e. PE. Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan juga perangkat Penanggung Jawab Penerapan APU-PPT

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPRS

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.1 Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan komisaris

Sesuai Akta Terakhir Nomor 9, tertanggal 27 September 2023 keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Ir. Zulkarnain Hasibuan
- Komisaris : Pudji Nastiti Budijanti
- Komisari : Atika
- Komisaris Independen : Mohammad Basir
- Komisaris Independen : Fajar Hernawan

1.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Ir. Zulkarnain Hasibuan
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. - Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. - Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di

		bidang keuangan dan perbankan atau terjadi keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan BPRS. - Komisaris Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. - Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Nama	: Pudji Nastiti Budijanti
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. - Komisaris wajib mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. - Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. - Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS. - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
3	Nama	: Atika
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

		- Dewan komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. - Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. - Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Nama	: Mohamad Basir
	Jabatan	: Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. - Dewan komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. - Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib

	mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. - Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. - wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko diantaranya menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. - Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
	Nama : Fajar Hernawan
	Jabatan : Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab	: -Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. - Dewan komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. - Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib

	mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. - Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, DPS, OJK, atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. - Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
--	---

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
1	Nama : Mustaen Jabatan : Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan pengelolaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menerapkan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK. - Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya.

		- bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris. - Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya. - Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Dewan Komisaris, DPS dan RUPS. - Memimpin dan melakukan koordinasi dengan Direksi lain dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan. - Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab sesuai dengan Tata Tertib dan Struktur Organisasi. - Melaksanakan pelatihan atas setiap SOP.
2	Nama	: Dwi Yulianingsih
	Jabatan	: Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Menjalankan pengurusan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank. - Melakukan pengelolaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. - Menerapkan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK tentang Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya. - Bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris. - Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai Tata Tertib Direksi dan Struktur Organisasi. - Menyusun SOP Teller, CS, Bagia Umum dan CSR dan hal-hal lain yang terkait operasional - Melaksanakan training atas SOP yang telah disusun
3	Nama	: Hariyanto
	Jabatan	: Direktur IT

	Tugas dan Tanggung Jawab : - Menjalankan pengurusan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank. - Menerapkan Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK tentang Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan lapangan usahanya. - Bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris. - Melaksanakan tugas dan tanggungjawab Direksi dan struktur organisasi. - Pengembangan Mobile Banking, ATM cardless, QRIS, pengamanan dan pengelolaan data server. - Penyusunan SOP terkait IT dan program-program IT, - Pembuatan animasi untuk diklat, promosi dan penerjemahan SOP.
4	Nama : Zaki Zamani
	Jabatan : Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan pengelolaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. - Menerapkan tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK tentang Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya,

	- Bersama-sama dengan Direksi lain untuk menyusun RBB dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, - Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Tata Tertib Direksi dan struktur organisasi, - Melakukan evaluasi seluruh ketentuan internal agar sesuai dengan ketentuan Pemerintah Lainnya dan melakukan koordinasi dengan Direktur Utama dan Direksi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan, - Melakukan pelatihan SOP seluruh bagian, dan memastikan seluruh bagian memahami SOP-masing-masing, - Memastikan pelaksanaan seluruh SOP sesuai ketentuan
	Nama : Yati Fitria Zamri
	Jabatan : Direktur Marketing
Tugas dan Tanggung Jawab	:- Menyediakan perencanaan dan kepemimpinan untuk Departemen Lending dengan memastikan bahwa ada struktur, sistem, kompetensi dan nilai-nilai yang tepat serta dikembangkan untuk memenuhi dan melampaui tujuan dari Departemen Lending. - Mengembangkan rencana pemasaran tahunan bagi organisasi seperti perencanaan pasar strategis, program riset pasar, kegiatan kekuatan lapangan dan pengendalian anggaran pemasaran. - Memastikan pencapaian target pembiayaan sesuai dengan hasil RUPS. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. - Melakukan pengembangan strategi penjualan dan strategi pemasaran - Mengukur dan melaporkan kinerja pembiayaan serta kinerja tim Lending. - Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitor pembiayaan. - Memastikan penerapan proses pembiayaan sesuai kebijakan BPRS. - Melakukan monitor terhadap pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. - Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang Lending dalam rangka memberikan informasi, kesempatan Pendidikan dan Pelatihan, dan peluang pertumbuhan pengalaman .

	- Menjaga hubungan baik dengan nasabah dengan menyelenggarakan dan mengembangkan program hubungan pelanggan spesifik. - Membina hubungan baik dengan Bank Umum Syariah, Lembaga keuangan lain dan pesaing lainnya dalam rangka mengidentifikasi dan memantau perkembangan yang signifikan di lapangan. - Memantau dan menganalisis perilaku konsumen BPRS.
--	--

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
1	Nama : TGH. Mahalli Fikri
	Jabatan : Ketua Dewan Pengawas Syariah
	Tugas dan Tanggung Jawab : Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, terutama tentang Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS serta pengawasan terhadap kegiatan BPRS. - Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. - Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. - Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. - Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru BPRS. - Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta system dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. - Memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan lain BPRS. - Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas SOP dan ketentuan Produk.

		- Wewenang DPS terkait Manajemen risiko yaitu mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
2	Nama	: Dr. Salimul Jihad, Lc. M.Ag
	Jabatan	: Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, terutama tentang Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS serta pengawasan terhadap kegiatan BPRS. - Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. - Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. - Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. - Memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru BPRS. - Mengkaji persyaratan, karakteristik, serta system dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. - Memberikan opini terkait pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan lain BPRS. - Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas SOP dan ketentuan Produk. - Wewenang DPS terkait Manajemen risiko yaitu mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

4.1 Komite Pemantau Risiko

a) Struktur dan Keanggotaan

- Ketua : Mohammad Basir
- Anggota : Ardhian Kusumawati
- Anggota : Yanti Fathurruwaidah

b) Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau risiko adalah memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dan paling sedikit melakukan:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite manajemen Risiko dan Satuan kerja Manajemen risiko

Selain tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan budaya manajemen risiko telah terbangun dengan baik sehingga dapat membatasi terjadinya fraud dan praktek-praktek perbankan yang tidak sehat
- 2) Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko fraud untuk Bank sebagai berikut :
 - a. Menyetujui kerangka Manajemen Risiko fraud;
 - b. Memantau efektifitas penerapan strategi anti fraud;
 - c. Memantau kejadian fraud yang terjadi di bank dan tindakan lanjutannya.
- 3) Identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko yang membutuhkan perhatian Dewan komisaris
- 4) Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, yaitu:
 - Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite Pemantau risiko dan melakukan review sesuai kebutuhan.
 - Menyusun program kerja komite untuk periode satu tahun dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- 5) Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap ketentuan Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
- 6) Jika dibutuhkan, Komite dapat meminta *Integrated Fraud Management* melakukan investigasi secara independen untuk melengkapi temuan investigasi.

4.2 Komite Audit

a) Struktur dan Keanggotaan

- Ketua : Fajar Hernawan
- Anggota : Ardhian Kusumawati

b) Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh fungsi audit intern;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan public dengan standar audit;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi bagi BPRS.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor Ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris;
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 6) Melakukan evaluasi atas seluruh perjanjian internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi atas risiko hukum yang dapat timbul atas perikatan tersebut;
- 7) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi BPRS yang diperoleh
- 8) Bekerja sama dengan auditor internal dan eksternal perusahaan
- 9) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

1. Kepemilikan saham anggota Direksi

No	Nama Direksi	Jabatan	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1	Mustaen	Direktur Utama	Tidak ada	0%
2	Dwi Yulianingsih	Direktur Operasional	Tidak ada	0%
3	Hariyanto	Direktur IT	Tidak ada	0%
4	Zaki Zamani	Direktur Kepatuhan	Tidak ada	0%
5	Yati Fitria Zamri	Direktur Marketing	Tidak Ada	0%

2. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

No	Nama Komisaris	Jabatan	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	Komisaris Utama	12.584.000.000	17.54%
2	Pudji Nastiti Budijanti	Komisaris	2.174.000.000	3.03%
3	Atika	Komisaris	0	0%
4	Mohamad Basir	Komisaris Independen	0	0%
5	Fajar Hernawan	Komisaris Independen	0	0%

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

1.1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mustaen	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dwi Yulianingsih	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Hariyanto	Direktur IT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Zaki Zamani	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Yati Fitria Zamri	Direktur Marketing	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

1.2 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mustaen	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dwi Yulianingsih	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Hariyanto	Direktur IT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Zaki Zamani	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Yati Fitria Zamri	Direktur Marketing	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan komisaris dengan Anggota Dewan komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS

2.1 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pudji Nastiti Budijanti	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Atika	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Mohammad Basir	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Fajar Hernawan	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.2 Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPRS

No	Nama Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pudji Nastiti Budijanti	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Atika	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Mohammad Basir	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Fajar Hernawan	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Remunerasi

Nama	Jumlah Orang Direksi	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang Komisaris	Jumlah (Rp)	Jumlah orang DPS	Jumlah (Rp)
Gaji	5	2.476.651.654,40	5	1.731.916.882,15	2	336.405327.20
Tunjangan	5	221.887.500,00	5	88.587.500,00	2	27.375.000,00
Tantiem	5	00	5	00	2	00
Bonus	5	1.473.750.000,00	5	859.687.500,00	2	122.812.500,00
Kompensasi Berbasis Saham	5	00	5	00	2	00
Remunerasi Lainnya	5	00	5	00	2	00

2. Fasilitas Lainnya

Nama	Jumlah Orang Direksi	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang Komisaris	Jumlah (Rp)	Jumlah orang DPS	Jumlah (Rp)
Perumahan	5	00	5	00	2	00
Transportasi	5	1.493.450.000,00	5	00	2	00
Kesehatan	5	67.837.819,00	5	56.500.000,00	2	00
Fasilitas Lainnya	5	00	5	00	2	00

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan*)	Perbandingan **)	
	(a/b)	: 1
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.10	: 1
b. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.85	: 1
c. Rasio gaji anggota Dewan komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan komisaris yang terendah	3.05	: 1
d. Rasio anggota Dewan pengawas Syariah tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas Syariah terendah (b)	1.0	: 1
e. Rasio gaji anggota direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	0.69	: 1
f. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai tertinggi (b)	3.70	: 1

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14 Januari 2023	4 Komisaris	Pengawasan Dekom terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi
2	17 Januari 2023	4 Komisaris 4 Direksi	Pengawasan Dekom dan pembahasan RBB
3	2 Februari 2023	4 Komisaris 2 Direksi	Pengawasan Dekom, Pemenuhan Tata Kelola dan Tindak Lanjut Komitmen OJK.
4	6 Maret 2023	4 Komisaris 4 Direksi	Pengawasan Dekom, terhadap rencana dan realisasi jaringan kantor.

5	29 Maret 2023	2 Komisaris 2 Direksi	Pembahasan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
6	12 Mei 2023	1 komisaris dan 4 Direksi	Persiapan Pembukaan Kantor Cabang Alas
7	5 Juni 2023	4 Komisaris 4 Direksi	Evaluasi kinerja dan evaluasi SOP
8	7 Juni 2023	4 Komisaris	Perpanjangan kembali kontrak pihak independen dalam rangka pemenuhan tata kelola dan manajemen risiko BPRS.
9	7 Juni 2023	5 Komisaris	Monitoring Kinerja Direksi
10	13 Juni 2023	2 Komisaris 1 DPS	Monitoring kinerja Direksi dari sisi Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah.
11	19 Juni 2023	4 Komisaris 5 Direksi	Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait gadai emas dan monitoring pelaksanaan aspek syariah.
12	19 September 2023	4 Komisaris 5 Direksi	1. Realisasi RBB Per Agustus 2023 2. Perkembangan IT (Penurunan PJP, ISO 27001, QRIS, SNAP BI, Danamon <i>Cash Conect</i> , Deposito BPRS Komunal).
13	22 September 2023	5 Komisaris	1. Monitoring Kinerja Direksi 2. Lain-lain
14	10 Oktober 2023	5 komisaris 4 Direksi	1. Pembahasan Temuan Komite Pemantau Risiko
15	4 Desember 2023	5 Komisaris 5 Direksi	Pembahasan RBB tahun 2024 yang berfokus pada pembiayaan, pendanaan dan perkembangan IT.

*Rapat Dewan Komisaris ada yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat Direksi

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan komisaris	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1	Ir. Zulkarnain Hasibuan	Komisaris Utama	12	1	100%
2	Pudji Nastiti Budijanti	Komisaris	13	0	100%
3	Atika	Komisaris	8	0	67.67%
4	Mohammad Basir	Komisaris Independen	14	0	100%
5	Fajar Hernawan	Komisaris Independen	12	0	100%

G. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
	9 Maret 2023	2 Orang	Rancangan SOP Gadai Emas
	13 April 2023	2 orang	Pemeriksaan triwulan pertama tahun 2023
	5 Juli 2023	2 orang	Hasil pemeriksaan lapangan
	7 Agustus 2023	2 orang	1. Pemberian masukan tentang pembiayaan syirkah 2. Peningkatan kualitas pengawasan syariah
	4 September 2023	2 orang	Persiapan pertemuan dengan OJK terkait dengan hasil pengawasan syariah BPRS Dinar Ashri
	9 Oktober 2023	2 orang	Temuan isu syariah pada produk Deposito Berhadiah hasil pemeriksaan kepatuhan semester ganjil 2023.
	3 Nopember 2023	2 orang	1. Pemeriksaan semester genap 2023 2. Rencana jadwal pembinaan karyawan

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota Dewan komisaris	Jabatan	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1	TGH. Mahalli Fikri	Ketua DPS	7	0	100%
2	Dr. Salimul Jihad, Lc. M.Ag	Anggota DPS	7	0	100%

H. Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah kasus yang dilakukan							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total fraud	-	-	-	-	1	-	1	1
Telah diselesaikan	-	-	-	-	1	-	-	-
Dlm proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	1	-

Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	1

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPRS selama periode 2023 dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambilan keputusan			Jenis transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Tidak terdapat transaksi benturan kepentingan namun terdapat potensi yang mengandung benturan kepentingan kepada koperasi Karyawan Bank Dinar dan Yayasan Metro Insan Mulia dikarenakan Koperasi Karyawan merupakan Koperasi Serba Usaha dengan rincian kegiatan usaha pada akta pendirian antara lain :

- Kegiatan usaha utama adalah usaha pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional Bank Dinar.
- Usaha pendukung mini market modern untuk anggota dan non anggota, home industry dan usaha lainnya.
- Usaha tambahan, usaha simpan pinjam dan usaha lainnya.

Dalam hal koperasi karyawan memberikan pinjaman kepada nasabah Bank Dinar tidak melanggar ketentuan karena sudah sesuai dengan kegiatan usaha koperasi. Antara Koperasi Karyawan Bank Dinar dan Bank Dinar merupakan institusi yang secara kepemilikan berbeda dan mempunyai tujuan serta kepentingan yang tidak sama sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai benturan kepentingan.

2. Yayasan Metro Insan Mulia merupakan lembaga non profit yang tujuan utamanya adalah kegiatan sosial sehingga tidak dapat di kategorikan sebagai benturan kepentingan.

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik

No	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	2/02/2023	Sosial	Sumbangan Rutin yang diberikan BPRS ke Pondok Pesantren dan Yayasan bulan Februari 2023	Pondok Pesantren dan Yayasan	52.448.800,-
	8/02/2022	Sosial	Pemberian beasiswa S2 kepada mahasiswa berprestasi pada Universitas Muhamadiyah Mataram Tahap IV	Mahasiswa S2 penerima beasiswa UMMAT	11.000.000,-
	8/02/2022	Sosial	Pemberian beasiswa SI kepada mahasiswa berprestasi pada Universitas Muhamadiyah Mataram tahap II	Mahasiswa S1 penerima beasiswa UMMAT	68.000.000,-
	03/03/2023	Sosial	Sumbangan rutin yang diberikan BPRS ke Pondok Pesantren dan Yayasan Bulan Maret 2023	Pengurus Pondok Pesantren dan Yayasan	51.948.800,-
	03/03/2023	Sosial	Program Sumbangan Tanah Pemakaman Keluarga Bima Mataram	TPU Bima	50.000.000,-
	15/03/2023	Sosial	Sumbangan iuran BPJS Difabel	BPJS	571.200,-
	17/03/2023	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan 1444 H Air Mineral	Masjid dan Ponpes sekitar jaringan kantor Bank Dinar	77.390.000,-
	20/03/2023	Sosial	Sumbangan ke Masjid An-Nur Kauman Sumbawa	Masjid An-Nur Kauman Sumbawa	5.000.000,-

	20/03/2023	Sosial	Sumbangan santunan anak yatim untuk syukuran kantor baru kantor cabang Sumbawa	Anak-anak yatim	5.750.000,-
	24/03/2023	Sosial	Program beasiswa S1 UMMAT Tahap II (3 orang)	Mahasiswa/I UMMAT	12.000.000,-
	27/03/2023	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan 1444H Sembako tahap I	Masyarakat sekitar area Kantor Bank Dinar dan Tenaga Kebersihan	189.500.000,-
	29/03/2023	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan 1444H Sembako tahap II	Masyarakat Umum sekitar jaringan kantor Bank Dinar, masjid, pondok pesantren dan tenaga kebersihan	393.500.000,-
	31/03/2023	Sosial	Sumbangan ke Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center	Masjid Islamic Center Mataram	25.000.000,-
	4/04/2023	Sosial	Sumbangan rutin yang diberikan BPRS ke Pondok Pesantren dan Yayasan April 2023	Pondok Pesantren dan Yayasan	52.920.000,-
	5/04/2023	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan 1444H (Sembako) Tahap III	Masyarakat umum sekitar Jaringan Kantor BPRS, Ponpes dan Tenaga Kebersihan	122.250.000,-
	5/04/2023	Sosial	Sumbangan ke Graha Al Quraniyah Mataram	Graha Al-Quraniyah	5.000.000,-
	17/04/2023	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan 1444H (Sembako) Tahap IV	Masyarakat Umum sekitar jaringan Kantor Bank Dinar, Yayasan, Ponpes dan tenaga kebersihan.	229.625.000,-

	17/04/2023	Sosial	Sumbangan Masjid Jami' Cakranegara (Program Ramadhan).	Masjid Jami' Cakranegara	25.000.000,-
	17/04/2023	Sosial	Sumbangan Program Ramadhan ke Yayasan Bina Insan Mandiri Mataram	Yayasan Bina Insan Mandiri Mataram	5.000.000,-
	04/05/2023	Sosial	Sumbangan rutin BPRS Bulan Mei 2023	Pondok Pesantren dan Yayasan	52.920.000,-
	8/05/2023	Sosial	Sumbangan masjid Baiturrahman Desa Tenga Kab. Bima	Masjid Baiturrahman	5.000.000,-
	8/05/2023	Sosial	Sumbangan Masjid Al-Huda Desa Ragi Kab. Bima	Masjid Al-Huda	5.000.000,-
	8/05/2023	Sosial	Sumbangan RA Perwanida II Kegiatan Kreatifitas Anak	RA Perwanida II	1.000.000,-
	8/05/2023	Sosial	Sumbangan Modal usaha Produktif program Mawar Emas	Pedagang asongan data dari MES dan OJK	40.000.000,-
	16/05/2022	Sosial	Sumbangan Pembangunan Musholla Kantor Kemenag Lombok Tengah	Penanggung Jawab/ Kemenag Lombok Tengah	5.000.000,-
	25/05/2023	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Al-Khaibar Ponpes Hidayatullah	Masjid Al-Khaibar Ponpes Hidayatullah	10.000.000,-
	25/05/2023	Sosial	Sumbangan Santunan Anak Yatim Kantor Sumbawa	Anak-anak Yatim wilayah Kantor Cabang Sumbawa	7.750.000,-
	30/05/2023	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Labuapi	Masjid Al-Muhajirin Labuapi	10.000.000,-
	31/05/2023	Sosial	Sumbangan ke RA Muslimat NW Mataram Kegiatan Tasyakuran	RA Muslimat NW Mataram	1.000.000,-

	31/05/2023	Sosial	Sumbangan STQH XXVII Tingkat Provinsi NTB di Kota Mataram	Panitia Acara STQH XXVII Provinsi NTB	5.000.000,-
	05/06/2023	Sosial	Sumbangan Rutin BPRS Bulan Juni 2023	Pondok Pesantren dan Yayasan	52.670.000,-
	05/06/2023	Sosial	Sumbangan Hewan Qurban 1444 H Tahap I	Masyarakat sekitar jaringan kantor BPRS, masjid, dan Ponpes	133.800.000,-
	16/06/2023	Sosial	Sumbangan Program Tabeq FKIIK NTB	Panitia Acara Tabeq FKIIK NTB	10.000.000,-
	23/06/2023	Sosial	Sumbangan Hewan Qurban 1444 H Tahap II	Masyarakat Umum, Masjid, Ponpes di sekitar jaringan Kantor BPRS Seluruh NTB	15.833.800,-
	27/06/2023	Sosial	Sumbangan Santunan Anak Yatim Pembukaan Cabang Dompu	Anak anak yatim di sekitar jaringan Kantor Cabang Dompu	10.500.000,-
	03/07/2023	Sosial	Sumbangan Rutin BPRS Bulan Juni 2023	Pondok Pesantren dan Yayasan	52.670.000,-
	03/07/2023	Sosial	Sumbangan Hewan Qurban Tahap III	Masyarakat Umum, Masjid, Ponpes di Sekitar Jaringan Kantor BPRS Seluruh NTB	258.200.000,-
	06/07/2023	Sosial	Sumbangan MTQ Kecamatan Kopang	Panitia Acara MTQ	1.000.000,-
	07/07/2023	Sosial	Sumbangan Untuk Festival Qasidah Kota Mataram	Panitia Acara Festival	3.000.000,-
	25/07/2023	Sosial	Sumbangan santunan anak Yatim Milad Bank Dinar	Anak-anak yatim dari pondok pesantren di di seluruh jaringan Kantor BPRS	25.600.000,-

	27/07/2023	Sosial	Sumbangan Pembangunan Musholla Polsek Keruak	Polsek Keruak	3.000.000,-
	02/08/2023	Sosial	Sumbangan rutin BPRS Bulan Agustus 2023	Pondok Pesantren dan Yayasan	52.920.000,-
	22/08/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan ke Yayasan Metro Insan Mulia	Yayasan Metro Insan Mulia	38.000.000,-
	23/08/2023	Sosial	Program beasiswa untuk mahasiswa Universitas Muhamadiyah Mataram Tahap III	Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Mataram	80.000.000,-
	01/09/2023	Sosial	Sumbangan rutin BPRS bulan September 2023	yayasan dan pondok pesantren di sekitar jaringan kantor BPRS	52.370.000,-
	01/09/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan ke Yayasan Metro Insan Mulia	Yayasan Metro Insan Mulia	52.250.000m-
	04/09/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan ke Yayasan Metro Insan Mulia	Laz MIM	8.078.500,-
	13/09/2023	Sosial	Sumbangan modal usaha produktif program mawar emas	Pedagang asongan yang telah terdata oleh MES dan OJK	144.000.000,-
	26/09/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan ke Yayasan Metro Insan Mulia	Laz MIM	12.300.000,-
	26/09/2023	Sosial	Sumbangan social untuk orang tua jompo	Panti Jompo Kota Mataram	13.200.000,-
	02/10/2023	Sosial	Sumbangan masjid AN-Nur Labuhan Sumbawa (Rutin)	Masjid An-Nur Labuhan Sumbawa	1.000.000,-
	03/10/2023	Sosial	Sumbangan Rutin BPRS bulan Oktober 2023	Pondok pesantren dan yayasan sekitar jaringan kantor BPRS	53.570.000,-

	03/10/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan ke Yayasan Metro Insan Mulia	Yayasan Metro Insan Mulia	97.254.500,-
	05/10/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan ke Yayasan Metro Insan Mulia	Laz MIM	10.000.000,-
	06/10/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan ke Yayasan Metro Insan Mulia	Laz MIM	5.000.000,-
	06/10/2023	Sosial	Sumbangan santunan anak yatim HUT Jamkrida NTB Bersaing	Anak yatim penerima santunan	5.000.000,-
	13/10/2023	Sosial	Sumbangan pembuatan kincir air desa Toya Aikmel melalui koramil Aikmel	Koramil Aikmel	3.000.000,-
	16/10/2023	Sosial	Sumbangan dana kemanusiaan ke palestina melalui Asbisindo Jatim Plus	Asbisindo Jatim Plus	5.000.000,-
	20/10/2023	Sosial	Sumbangan dana kebajikan pembangunan mushola SD IT Ulul Albab	Sekolah SD IT Ulul Albab	2.000.000,-
	24/10/2023	Sosial	Sumbangan dana kebajikan gharimin melalui Laz Dasi NTB	Laz Dasi NTB	48.300.000,-
	25/10/2023	Sosial	Sumbangan Yayasan MIM	Laz MIM	10.200.000,-
	2/11/2023	Sosial	Sumbangan Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia	Yayasan Metro Insan Mulia	111.148.000,-
	3/11/2023	Sosial	Sumbangan Rutin BPRS Bulan November 2023	Pondok pesantren dan yayasan sekitar jaringan kantor BPRS	54.770.000,-
	6/11/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM	Laz Metro Insan Mulia	5.450.000,-

	14/11/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Untuk Palestina	NTB For Palestine	5.000.000,-
	14/11/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM	Laz MIM	4.000.000,-
	16/11/2023	Sosial	Sumbangan Nasi Kotak dengan Laziz MIM	Laz MIM	1.500.000,-
	17/11/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM	Laz MIM	5.950.000,-
	21/11/2023	Sosial	Sumbangan Pembelian Syal Palestina	Karyawan Bank Dinar	2.350.000,-
	23/11/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Operasional Yayasan MIM Tahap VIII	Ketua Laz MIM	2.040.000,-
	24/11/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM	Laz MIM	15.400.000,-
	01/12/2023	Sosial	Sumbangan Rutin BPRS Bulan Desember 2023	Pondok pesantren dan yayasan sekitar jaringan kantor BPRS	59.770.000,-
	5/12/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM	Laz MIM	11.931.500,-
	5/12/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia	Yayasan Metro Insan Mulia	4.750.000,-
	6/12/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan Yayasan MIM	LAZ MIM	1.500.000,-
	7/12/2023	Sosial	Sumbangan Ke Palestina Melalui Baznas Lombok Tengah	Baznas Lombok Tengah	2.000.000,-
	15/12/2023	Sosial	Sumbangan Kebajikan Yayasan Metro Insan Mulia	Yayasan Metro Insan Mulia	55.574.000,-

	22/12/2023	Sosial	Sumbangan Dana Kebajikan MIM	LAZ MIM	23.200.000,-
	3/01/2024	Sosial	Sumbangan Rutin BPRSDA Bulan Januari 2024	Pondok pesantren dan yayasan sekitar jaringan kantor BPRS	9.575.900,-

B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan tata Kelola BPRS

1. Nilai dan Peringkat Komposit

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola BPRS Dinar Ashri adalah sebagai Berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai komposit
Total Penilaian Faktor	0.44	0.33	0.24	0.06	0.21	0.20	0.20	0.20	0.05	0.23	0.15	0.10	0.13	2.54
Predikat Komposit	Baik													

2. Kesimpulan *Self Assesment*

Kesimpulan	
Faktor 1	Jumlah anggota Direksi telah sesuai ketentuan, Direksi BPRS berjumlah 5 orang: 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Operasional, 1 orang Direktur IT, 1 orang Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan 1 orang Direktur Marketing serta anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi BPRS.
Faktor 2	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan, tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu 1 orang Komisaris Utama, 2 orang Komisaris dan 2 orang Komisaris independen serta anggota

	Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Komisaris BPRS.
Faktor 3	Struktur anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS telah sesuai Ketentuan yaitu 1 Orang Ketua DPS dan 1 orang anggota DPS, serta telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah BPRS.
Faktor 4	BPRS telah memiliki Komite pemantau Risiko dan Komite Audit. Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit yang sudah dibentuk telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Faktor 5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS sudah cukup memenuhi prinsip syariah dan setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru tetap memerhatikan fatwa DSN-MUI serta pendapat dan opini DPS, namun masih butuh penyempurnaan untuk kedepannya.
Faktor 6	Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penyelesaian benturan kepentingan namun implementasinya masih belum maksimal dilaksanakan.
Faktor 7	Bank sudah menunjuk Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan sehingga fungsi kepatuhan sudah dapat dijalankan serta telah memiliki pedoman kerja, system dan prosedur Kepatuhan. Dan BPRS berupaya untuk menyempurnakan kegiatan usaha agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
Faktor 8	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur meskipun dalam pelaksanaan belum secara optimal. Dan PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
Faktor 9	BPRS telah menunjuk KAP yang sudah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS.
Faktor 10	BPRS telah membentuk satuan Kerja Manajemen Risiko dan memiliki pedoman kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang dalam SOP No. 06/SOP/BPRSDA/IV/2022, dan BPRS telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang disampaikan ke OJK, namun belum dapat mengendalikan secara optimal terutama untuk Risiko Kredit.
Faktor 11	BPRS telah memiliki pedoman BMPD di dalam kebijakan/SOP Pembiayaan, dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu diperhatikan dalam proses penyaluran pembiayaan khususnya fasilitas pembiayaan besar hendaknya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya terkait dokumen pendukung maupun legalitas dan pengikatan agunan yang lebih baik.
Faktor 12	Rencana Bisnis telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPRS yang mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah dan rencana strategis jangka

	panjang berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS.
Faktor 13	Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditanda tangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.

Demikian kesimpulan umum hasil penilaian penerapan tata kelola di PT. BPRS Dinar Ashri untuk periode 31 Desember 2023 kami sampaikan.

Mataram, 31 Januari 2024

PT. BPRS DINAR ASHRI